

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

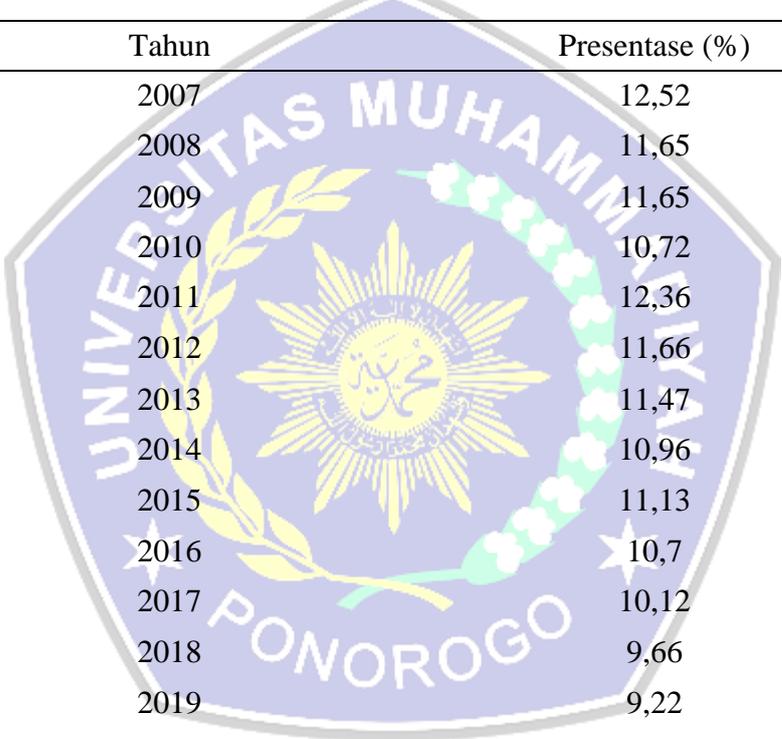
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap rakyat, dan intuisi nasional yang diikuti dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketidaksetaraan dan pemberantasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2015). Pembangunan ekonomi sebuah negara terlihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satu di antara adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan di negara-negara sedang berkembang merupakan masalah yang cukup serius mengingat indikator pembangunan ialah tercapainya penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Pada umumnya penanganan kemiskinan dengan menggunakan strategi yang mengarah kepada pencapaian tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional setinggi-tingginya.

Menurut BPS (2022) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai taraf tertentu yang dianggap manusiawi. Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah ada hentinya yang telah ada sejak lama. Banyaknya jumlah penduduk dan tidak meratanya pembangunan, kurangnya pemerataan lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran yang tersebar di kota maupun di desa, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya

masalah kemiskinan di Indonesia.

Tabel 1 diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil dari jumlah tingkat kemiskinan di Indonesia pemerintah harus lebih memeperhatikan dalam pengentasan kemiskinan demi kesejahteraan Indonesia serta memberikan dampak positif bagi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Tabel 1
Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2007-2021



Tahun	Presentase (%)
2007	12,52
2008	11,65
2009	11,65
2010	10,72
2011	12,36
2012	11,66
2013	11,47
2014	10,96
2015	11,13
2016	10,7
2017	10,12
2018	9,66
2019	9,22
2020	10,19
2021	9,71

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS-Statistik Indonesia

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi Yacoub (2012). Dengan kata lain, pendekatannya hrsus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat kompleks, sehingga

berbagai upaya yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan harus diimplemesntasikan secara baik dan benar sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah”. Data mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Salah satu indikator yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Manusia menjadi aset kekayaan suatu bangsa, apabila masyarakat dapat hidup sehat dan berpengetahuan yang baik maka produktifitas yang akan didapat oleh wilayah atau negara akan meningkat dan mempengaruhi kelayakan standar hidup. Hal ini selaras dengan konsep indeks pembangunan manusia.

Menurut BPS (2022) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasa kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Lanjouw, dkk. (dalam Saputra, 2011) menyatakan pembangunan

manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas dan ada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Menurut pandangan *The United Nations Development Programme (UNDP)* merumuskan pembangunan manusia sebagai pilihan untuk manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghasilan serta pekerjaan. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Data mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menjelaskan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun ada peningkatan IPM dari tahun ke tahun, peningkatan IPM diharapkan mampu mempengaruhi penurunan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara menurunkan kemiskinan pada suatu wilayah. Dengan adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi membuktikan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan.

Tabel 2
Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2021

Tahun	Presentase (%)
2007	70,59
2008	71,17
2009	71,76
2010	72,27
2011	67,09
2012	67,7
2013	68,31
2014	68,9
2015	69,55
2016	70,18
2017	70,81
2018	71,39
2019	71,92
2020	71,94
2021	72,92

Sumber : Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia BPS-Statistik Indonesia

Indikator lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah Produk Domestikan Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah daerah dalam periode tertentu Sigalingging (2019).

PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki, besaran dari PDRB yang dihasilkan dari masing-masing daerah bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produktif yang dimiliki daerah tersebut. PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tertentu Sukirno (2015).

Jika PDB digunakan sebagai acuan dalam melihat kinerja perekonomian suatu negara, ukuran kinerja perekonomian dalam suatu daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Miliar Rupiah) Di Indonesia Tahun 2007-2021

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Miliar Rupiah)
2007	1.890.607,08
2008	1.999.046,59
2009	2.094.358,01
2010	2.222.986,86
2011	7.286.914,80
2012	7.735.785,50
2013	8.177.822
2014	8.603.636
2015	9.033.169
2016	9.498.833
2017	9.995.225
2018	10.526.928
2019	11.052.884
2020	10.837.930
2021	10.803.025

Sumber : Survei Badan Pusat Statistik- Statistik Indonesia

Tabel 3 diketahui bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut provinsi (Miliar rupiah) di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun. Dalam pembangunan PDRB yang terus meningkat diharapkan akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran merupakan salah satu bagian

indikator dari tingkat kemiskinan. Pengangguran adalah seseorang yang angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi dan lain sebagainya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok ekonomi yang paling utama.

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam mengembangkan perekonomiannya adalah masalah ketenagakerjaan. Apalagi setelah mengalami krisis multifaset yang menjerumuskan negara Indonesia kedalam kemerosotan ekonomi, politik, moral dan sosial. Masalah dengan perkembangan pasar tenaga kerja adalah tingginya pengangguran dan setengah pengangguran karena banyak bidang usaha ditutup karena kebangkrutan.

Selain itu, kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah, seperti kurangnya perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pengangguran berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan kesempatan kerja. Jika kedua hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan timbul berbagai dampak negatif baik terhadap stabilitas ekonomi maupun sosial dan politik Zurisdah (2016). Data mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 diketahui bahwa pengangguran di Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun, namun mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar

7.07% akan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 6,49%. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang positif, yaitu ketika pengangguran menurun maka kemiskinan akan menurun. Secara teoritis, ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Hubungan positif antara kemiskinan dan pengangguran tersebut ditemukan di beberapa negara.

Tabel 4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Indonesia Tahun 2011-2021

Tahun	Presentase (%)
2007	9,11
2008	8,39
2009	8,14
2010	7,14
2011	6,56
2012	6,14
2013	6,17
2014	5,94
2015	6,18
2016	5,61
2017	5,5
2018	5,3
2019	5,23
2020	7,07
2021	6,49

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)BPS- Statistik Indonesia

1.2 Perumusan Masalah

Kemiskinan sebagai masalah yang kompleks di negara Indonesia, walaupun mengalami kenaikan dan penurunan. Tetapi jika tidak diatasi dari faktor penyebabnya maka tingkat kemiskinan akan kembali naik.

Beberapa faktor kemiskinan yaitu produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terbuka. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, sehingga peneliti merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021?
3. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan produk domestik regional bruto secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), terhadap kemiskinan di Indonesia.

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021

3. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021
4. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan produk domestik regional bruto secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021

2. Manfaat penelitian

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan untuk mahasiswa bagi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam pengembangan pusat sumber belajar yakni perpustakaan, terutama pemanfaatan repository sebagai media untuk memperlancar penyelesaian menulis skripsi.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya terkait indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021.

c. Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sebagai salah satu sumber informasi khususnya bagi Kementerian Keuangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan Provinsi/ Kota untuk penelitian pada priode selanjutnya.